

Indikator Kesejahteraan Rakyat

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2020



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Indikator Kesejahteraan Rakyat

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2020

ISSN / ISBN: 2655-4097

Nomor Publikasi: 64040.2125

Katalog: 4102004.6404

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xiv+ 94 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Canva

Freepik

Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Canva

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Dicetak Oleh:

CV. Siswa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2020

Pengarah

Akhmad Junaidi, S. E, M.Si

Penanggungjawab

Rizka Maulina, SST, M. Si

Penyunting

Rizka Maulina, SST, M. Si

Penulis

Shafira Murni, S.ST
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

Pengolah Data

Shafira Murni, S.ST
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

Desain/Layout & Gambar Kulit:

Shafira Murni, S.ST
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

Kata Pengantar



Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang dirilis setiap tahunnya. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data yang berasal dari instansi lain (Data Sekunder), dengan maksud untuk memberikan gambaran umum keadaan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Timur.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu Kependudukan; Kesehatan; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Pengeluaran Rumah Tangga dan Kemiskinan serta Perumahan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Sangatta, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Timur,

Akhmad Junaidi, SE., M.Si
NIP. 19660420 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xiii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi	5
1.4. Sistematika Penyajian	5
1.5. Konsep dan Definisi	6
2. KEPENDUDUKAN DAN KB	
2.1 Jumlah Penduduk	20
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	21
2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana	24
3. KESEHATAN	
3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	34
3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	36
3.3 Tenaga Penolong Persalinan	40
3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	42
4. PENDIDIKAN	
4.1 Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pendidikan	48
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	53
5. KETENAGAKERJAAN	
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja	60
5.2 Lapangan Pekerjaan	65

6. PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN	
6.1 Pengeluaran Rumah Tangga	71
6.2 Penduduk Miskin	75
7. PERUMAHAN	
7.1 Fasilitas Rumah Tinggal	82
7.2 Kualitas Rumah Tinggal	90

<https://kutimkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	21
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	24
Tabel 2.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Ketas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	25
Tabel 2.4	Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	27
Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020	35
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020	38
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang berobat jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020	39

Tabel 3.4	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang pernah diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	43
Tabel 4.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	49
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	54
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	55
Tabel 5.1	Perkembangan persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	60
Tabel 5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	62
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	63
Tabel 5.4	Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	64

Tabel 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	65
Tabel 6.1	Pengeluaran Sebulan untuk Makanan menurut Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	72
Tabel 6.2	Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	74
Tabel 6.3	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2020	76
Tabel 6.4	Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020	76
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	84
Tabel 7.2	Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020	85
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2020	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	23
Grafik 2.2	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	28
Grafik 2.3.	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2020	29
Grafik 3.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020	41
Grafik 4.1	Persentase penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020	51
Grafik 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	53
Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020	86
Grafik 7.2	Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2020 (meter)	89

BAB 1: PENDAHULUAN

Publikasi **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2020** bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur.

ISI

LATAR BELAKANG

TUJUAN

METODOLOGI

SISTEMATIKA PENYAJIAN

KONSEP DAN DEFINISI





1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang termuat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tekad Pemerintah Daerah Kutai Timur. Pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan bidang lainnya merupakan bidang-bidang pembangunan yang harus dinikmati oleh semua masyarakat Kutai Timur tanpa membedakan suku, agama, partai politik, dan sebagainya.

Untuk dapat melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, diperlukan monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Pendahuluan

Dalam memonitor pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat di Kutai Timur, diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur. Disadari bahwa dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) melalui aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga dan kemiskinan, serta perumahan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan diukur. Publikasi ini hanya menyajikan kondisi kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan terukur (*measurable welfare*), baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

1.2. Tujuan

Tujuan secara umum pembuatan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tujuan secara khusus dalam pembuatan publikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran penduduk Kutai Timur, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumah tangga dan kemiskinan, serta perumahan.

Dengan tersedianya Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2020 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan terkait kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Metodologi

Dalam menyusun Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2020 ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil beberapa survei yang telah dilaksanakan BPS seperti Susenas dan Sakernas, serta data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi terkait.

Adapun metodologi yang diterapkan dalam menyajikan publikasi ini adalah dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, potret kesejahteraan rakyat Kutai Timur 2020 akan dianalisis sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia.

1.4 Sistematika penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bagian. Masing-masing bagian disajikan uraian secara rinci sesuai dengan tema besar bahasan dalam buku ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan buku ini, tujuan, metodologi dan sistematika penyajian, serta konsep yang digunakan. Bab II menyajikan kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur yakni mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, serta Keluarga Berencana. Bagian selanjutnya (Bab III) menyajikan kondisi kesehatan mencakup derajat dan status kesehatan penduduk, tenaga penolong persalinan,

Pendahuluan

pemberian ASI bagi balita, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Gambaran mengenai kondisi pembangunan dalam bidang pendidikan disajikan pada Bab IV yang meliputi angka partisipasi sekolah, partisipasi kasar dan partisipasi murni, putus sekolah, angka melek huruf, dan pendidikan yang ditamatkan. Pada Bab V disajikan data ketenagakerjaan yang berisi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja, lapangan pekerjaan. Bab VI menjelaskan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yang dilihat dari besar pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta menyajikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur. Pada Bab VII, menjelaskan kondisi perumahan dan lingkungan di Kabupaten Kutai Timur yang ditinjau dari fasilitas dan kualitas rumah tinggal.

1.5 Konsep dan Definisi

Berikut merupakan konsep dan definisi mengenai istilah-istilah yang dipaparkan dalam menyusun Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2020.

- a. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

- b. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- c. **Rumah Tangga Khusus** adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.
- d. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.
Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Pendahuluan

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

- f. **Kawin** adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.
- g. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- h. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.
- i. **Anak Lahir Hidup** adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

j. **Anak Masih Hidup** adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

k. **Pendidikan**

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi (PT).

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

l. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

m. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pendahuluan

Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- n. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan, dan sederajat.

SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- o. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

- p. **Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- q. **Angka Partisipasi**; terdiri dari 3 jenis yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih Sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

P_{7-12} = Penduduk Usia 7-12 tahun

- (2) Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

$$APM_{7-12} = \frac{P_{7-12}^{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- r. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dll.

Pendahuluan

- s. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- t. **Penolong Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
- u. **ASI (Air Susu Ibu)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.
- v. **Mengobati Sendiri** adalah upaya ART yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- w. **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang menganggur.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus

dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai penganggur adalah mereka yang memenuhi kondisi sebagai berikut.

- (1) Mencari pekerjaan;
- (2) Mempersiapkan suatu usaha;
- (3) Sudah diterima bekerja namun belum memulainya;
- (4) Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata

Pendahuluan

seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.

Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

- x. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- y. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

- z. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

<https://kutimkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kctimkab.bps.go.id>

BAB 2: KEPENDUDUKAN

Kepadatan penduduk di Kutai Timur sebesar **13 jiwa per km²**, yakni **setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 13 jiwa**

Persebaran penduduk terbanyak adalah di **Kecamatan Sangatta Utara**, yaitu **27,82** persen dari seluruh total penduduk.

60,86 persen penduduk Kutai Timur berstatus **KAWIN**

**JUMLAH
PENDUDUK
KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

434.459

JIWA

**) hasil SENSUS PENDUDUK 2020*



BAB 2 KEPENDUDUKAN

INKESRA



Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk dapat berperan sebagai subjek pembangunan, di mana penduduk menjadi penggerak kegiatan pembangunan, tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan. Di sisi lain, penduduk sebagai objek pembangunan, yakni pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kependudukan, terutama kapasitas penduduk suatu wilayah.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan

berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Karena masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pada tingkat nasional, terdapat isu kependudukan terkait bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia selama periode 2020-2030. Oleh karena itu, di bidang kependudukan, perlu disusun rencana strategis pemerintah dalam menghadapi *the windows of opportunity*. Bonus demografi didefinisikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya Rasio Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin *et. al.* 2003). Pada periode dengan bonus demografi, belanja publik yang semula diperuntukkan bagi program-program sosial dapat dialihkan untuk investasi pada sektor produktif maupun infrastruktur.

2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk Kutai Timur menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 adalah sebesar 434.459 jiwa. Mayoritas penduduk berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai Ibukota Kabupaten Kutai Timur, yaitu

Kependudukan

sebanyak 120.873 jiwa, diikuti Kecamatan Bengalon sebanyak 45.314 jiwa dan Kecamatan Muara Wahau sebesar 35.963 jiwa.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Muara Ancalong	15.246
Busang	6.396
Long Mesangat	7.168
Muara Wahau	35.963
Telen	10.829
Kongbeng	27.609
Muara Bengkal	14.030
Batu Ampar	7.673
Sanggatta Utara	120.873
Bengalon	45.314
Teluk Pandan	18.791
Sanggatta Selatan	30.117
Rantau Pulung	12.167
Sangkulirang	26.449
Kaliorang	15.355
Sandaran	12.604
Kaubun	14.867
Karangan	13.008
Kutai Timur	434.459

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Sensus Penduduk 2020

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

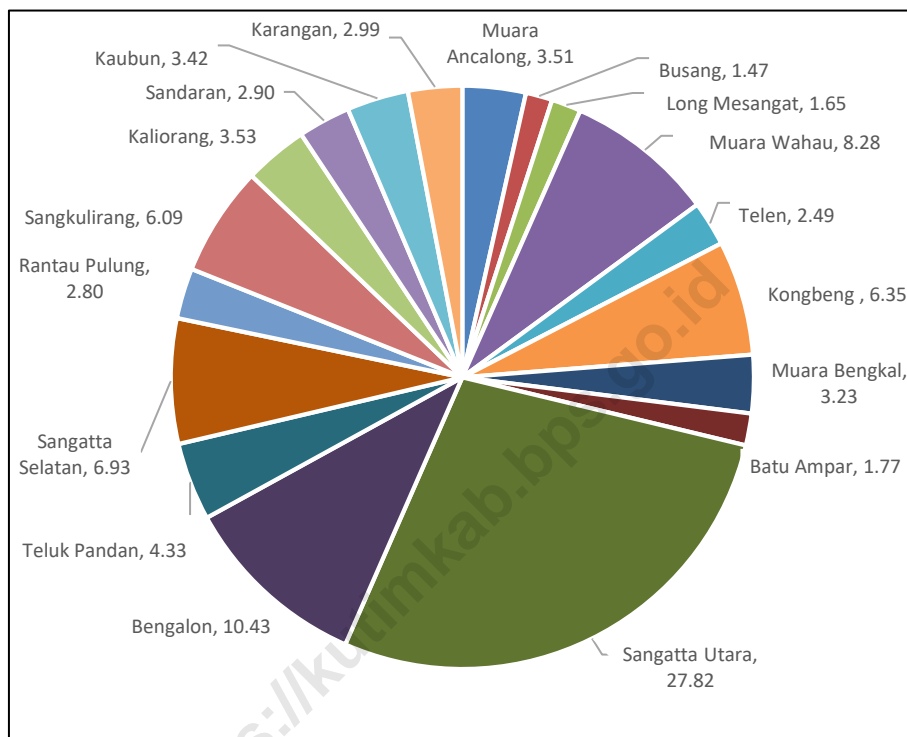
Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi. Persebaran penduduk yang tidak

merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kutai Timur secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang cukup besar.

Kecenderungan penduduk tinggal pada daerah pusat pemerintahan dan perdagangan menyebabkan terjadinya pengelompokan pada daerah ibukota kabupaten. Sebagian besar penduduk lainnya akan berpindah pada daerah sekitar daerah ibukota kabupaten. Dalam hal ini Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota kabupaten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, sedangkan Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan mengalami penambahan penduduk sebagai dampak dari daerah sekitar pusat ibukota kabupaten.

Berdasarkan Grafik 2.1 dibawah, pada tahun 2020 di Kutai Timur persebaran penduduknya yang terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara, yaitu sebesar 27,82 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Muara Wahau masing-masing sebesar 10,43 persen dan 8,28 persen. Di wilayah lain persebarannya di bawah 8 persen. Wilayah yang persebaran penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Busang, yaitu sebesar 1,47 persen.

Grafik 2.1
Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Sensus Penduduk 2020

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan yang jauh dari ibukota memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Namun bila dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Kutai Timur memiliki persebaran luas wilayah yang berbeda antar kecamatan. Hal ini berdampak pada keberagaman kepadatan penduduk antar kecamatan. Secara umum, pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Kutai Timur sebesar 13 jiwa per km², yang dapat diartikan bahwa setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 13 jiwa. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung, yang mencapai 96 dan 85 jiwa setiap km². Kepadatan penduduk yang terendah, pada kisaran di bawah 10 jiwa setiap km² adalah di wilayah Kecamatan Muara

Ancalong, Busang, Muara Wahau, Telen, Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan. Pola persebaran dan kepadatan penduduk yang demikian kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah sehingga menciptakan disparitas yang tajam antara wilayah kecamatan.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Muara Ancalong	15.246	2.739,30	6
Busang	6.396	3.721,62	2
Long Mesangat	7.168	526,98	14
Muara Wahau	35.963	5.724,32	7
Telen	10.829	3.129,61	4
Kongbeng	27.609	581,27	48
Muara Bengkal	14.030	1.522,80	10
Batu Ampar	7.673	204,50	38
Sangatta Utara	120.873	1.262,59	96
Bengalon	45.314	3.196,24	15
Teluk Pandan	18.791	831,00	23
Sangatta Selatan	30.117	1.660,85	19
Rantau Pulung	12.167	143,82	85
Sangkulirang	26.449	3.322,58	8
Kaliorang	15.355	438,91	35
Sandaran	12.604	3.419,30	4
Kaubun	14.867	257,45	58
Karangan	13.008	3.064,36	5
Kutai Timur	434.459	35.747,50	13

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Sensus Penduduk 2020

2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan kondisi fertilitas suatu wilayah. Status perkawinan dibagi

Kependudukan

menjadi empat, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Semakin besar jumlah penduduk yang berstatus kawin, semakin besar pula peluang tingkat kelahiran di wilayah tersebut.

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis kelamin tahun 2020. Secara umum penduduk Kutai Timur berstatus kawin mempunyai proporsi terbesar yaitu 60,86 persen, kemudian disusul penduduk berstatus belum kawin sebesar 33,31 persen. Sedangkan penduduk berstatus cerai 5,83 persen.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut
Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020

Status Perkawinan	Penduduk (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	39,09	26,31	33,31
Kawin	56,13	66,58	60,86
Cerai	4,78	7,11	5,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

Penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (39,09 persen) lebih besar dibanding penduduk perempuan (26,31 persen). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berstatus kawin (66,58 persen) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (56,13 persen). Kondisi yang sama juga terlihat untuk penduduk perempuan (7,11 persen) yang berstatus cerai persentasenya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki (4,78 persen).

Penundaan usia perkawinan pertama dan program keluarga berencana (KB) pada wanita merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Dengan penundaan usia perkawinan pertama akan berdampak memperpendek masa reproduksi, sedangkan semakin muda seseorang melakukan perkawinan, maka akan semakin panjang masa reproduksinya dan akan memperbesar peluang orang tersebut untuk melahirkan anak lebih banyak. Dengan demikian memungkinkan terjadinya tingkat fertilitas yang lebih tinggi.

Namun, wanita yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, yang akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak. Salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi wanita adalah memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, karena akan meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya tentang risiko kawin muda bagi ibu sehingga menjadikan mereka berani mengambil keputusan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda.

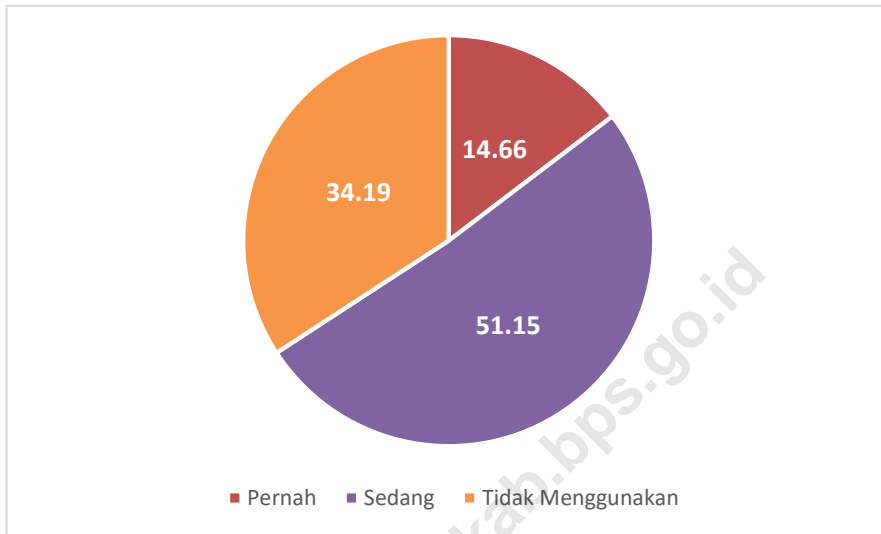
Tabel 2.4
Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020

Tahun	Umur Kawin Pertama			Total
	≤ 16	17-18	≥19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	17,77	18,17	64,06	100,00
2019	19,45	20,55	60,00	100,00
2018	16,79	21,96	61,25	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020

Komposisi penduduk wanita menurut usia perkawinan pertama di Kutai Timur yakni 17,77 persen berusia 16 tahun kebawah pada tahun 2020, hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 (19,45 persen). Persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur 17-18 tahun sebanyak 18,17 persen, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 (20,55 persen). Untuk usia perkawinan pertama yang lebih matang yaitu usia 19 tahun keatas sebanyak 64,06 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 (60 persen).

Grafik 2.2
Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut
Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2020

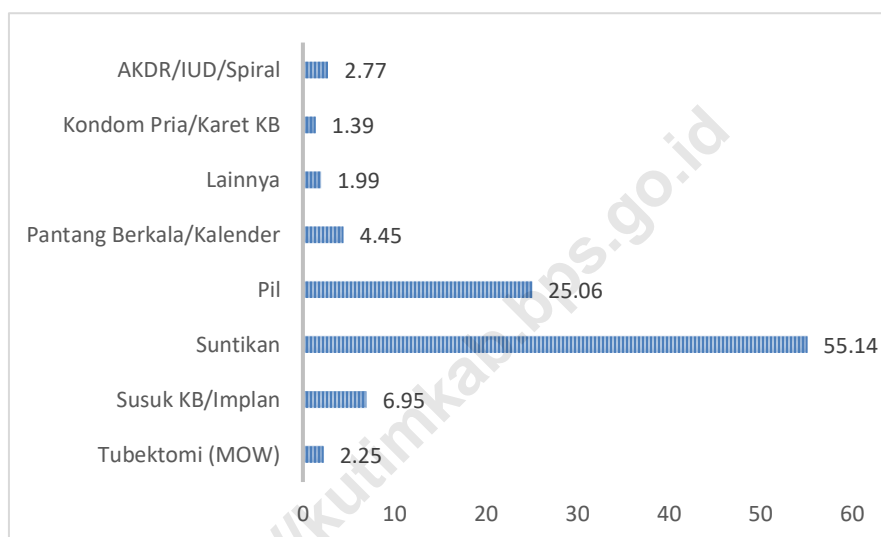
Pada tahun 2020 sekitar 14,66 persen wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin menyatakan pernah menggunakan alat/cara KB, angka ini mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 22,18 persen tahun 2019. Sementara yang menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB sekitar 51,15 persen, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 47,88 persen tahun 2019.

Menunda/menjarangkan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi merupakan upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas. Pilihan penggunaan alat/cara KB oleh akseptor diantaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut, dan sebagainya. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan pemakaian alat kontrasepsi akan mengalami penurunan. Begitu juga

Kependudukan

dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi pilihan penggunaan alat kontrasepsi.

Grafik 2.3
Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020

Alat kontrasepsi jika tersedia dan mudah diperoleh, ada kecenderungan alat kontrasepsi tersebut akan digunakan. Suntik merupakan alat KB yang banyak dipilih wanita pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2020, metode suntik digunakan oleh sekitar 55,14 persen akseptor KB dimana angka ini terus meningkat dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 (54,18 persen). Masih tingginya prevalensi pemakaian alat KB Suntik ini diduga akibat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat/cara KB ini relatif lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan. Selanjutnya pilihan alat KB kedua terbesar pada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur adalah metode Pil yakni 25,06 persen. Meskipun merupakan persentase kedua tertinggi, angka ini menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 26,05 persen. Di posisi terbesar

ketiga pada 2020, yaitu penggunaan Susuk KB/Implan sebesar 6,95 persen yang meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,8 persen. Penggunaan alat AKDR/IUD/Spiral mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 2,77 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,87 persen.

Selain menerapkan KB dengan alat, wanita berusia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur juga ada yang menerapkan KB secara tradisional atau Pantang Berkala. Pada tahun 2020 terdapat 4,45 persen wanita yang menerapkan metode ini, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 2,28 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat penggunaan KB dengan metode Tubektomi/MOW (Metode Operasi Wanita) sebesar 2,25 persen dan penggunaan kondom/karet pria sebesar 1,39 persen. Selain itu, penggunaan KB lainnya adalah sebesar 1,99 persen. KB lainnya tersebut di antaranya adalah MOP (Metode Operasi Pria) atau Vasektomi, metode menyusui alami, dan metode lainnya.

BAB 3: KESEHATAN

Angka kesakitan dan keluhan kesehatan pada penduduk **PEREMPUAN** lebih tinggi dibandingkan penduduk **LAKI-LAKI**

Proses penolong persalinan oleh **TENAGA KESEHATAN** pada tahun 2020 adalah sebesar **99,91%**. Mengalami **PENINGKATAN** dibanding tahun 2019.

95,57

**Baduta di Kutai TIMUR
PERNAH DIBERI ASI**

**) data tahun 2020*





BAB 3 KESEHATAN

INKESRA

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan masyarakat suatu daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan daerah tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Apabila pemenuhan kesehatan dapat terwujud maka akan lahir SDM berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan sehat, maka seseorang dapat berbuat, berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif lainnya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Secara langsung ataupun tidak langsung, gangguan kesehatan atau penyakit akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian rumah tangga. Penyebabnya adalah biaya untuk pengobatan, hilangnya waktu kerja atau sekolah, dan hilangnya aset keluarga. Sakit secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pengobatan (termasuk ongkos transportasi). Penduduk pada kelompok usia produktif, jika sakit akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya, sedangkan pada kelompok anak sekolah akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kasus penyakit kronis atau berat, orang akan terpaksa menjual aset keluarga (seperti: tanah, rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk biaya pengobatan.

Kesehatan

Untuk mewujudkan keadaan sehat, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan bila tingkat kesehatan penduduk pada level yang relatif tinggi maka akan memungkinkan mereka mampu mencurahkan seluruh ketrampilan, keahlian, dan kreatifitas selama jam-jam kegiatan mereka. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan penduduk berada pada kondisi yang kurang baik maka mereka cenderung kurang berperan serta dalam menciptakan tingkat efisiensi pekerjaan yang tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Tabel 3.1 memperlihatkan perkembangan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan referensi. Penduduk yang pernah mempunyai keluhan kesehatan mengalami penurunan dari 27,91 persen pada tahun 2019 menjadi 20,27 persen pada tahun 2020. Jika dilihat menurut jenis kelamin persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki dimana masing-masing sebesar 21,50 persen untuk penduduk perempuan dan 19,23 persen untuk penduduk laki-laki.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020

Jenis Kelamin	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Keluhan Kesehatan		
Laki-Laki	25,98	19,23
Perempuan	30,16	21,50
Laki-Laki + Perempuan	27,91	20,27
Angka Kesakitan		
Laki-Laki	11,74	7,44
Perempuan	13,25	8,40
Laki-Laki + Perempuan	12,43	7,88

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Kesehatan

Selain keluhan kesehatan, pada Tabel 3.1 juga ditampilkan perkembangan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami sakit dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 12,43 persen menjadi 7,88 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni angka kesakitan perempuan sebesar 8,40 persen sementara angka kesakitan laki-laki pada tahun 2020 sebesar 7,44 persen, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2019 yang masing-masing sebesar 13,25 persen untuk angka kesakitan perempuan dan 11,74 persen untuk angka kesakitan laki-laki.

3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat merupakan gambaran dari pola pikir masyarakat tersebut, salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat adalah akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di satu sisi, semakin sering masyarakat melakukan konsultasi atau pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, mengisyaratkan semakin tinggi kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di sisi lain, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan mengisyaratkan semakin tinggi juga tingkat keluhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan

masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat akan dapat diatasi. Sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan pada gilirannya akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Dari hasil Susenas dapat disajikan data tentang upaya pengobatan yang dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penduduk Kutai Timur yang berobat jalan pada tahun 2019 sebesar 47,40 persen turun menjadi 38,49 persen pada tahun 2020 (Tabel 3.2). Sedangkan, penduduk yang berobat sendiri persentasenya meningkat dari tahun 2019 sebesar 52,60 persen naik menjadi 61,51 persen tahun 2020.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019

Jenis Kelamin	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Penduduk yang Berobat Jalan		
Laki-Laki	42,22	34,25
Perempuan	52,61	42,96
Laki-Laki + Perempuan	47,40	38,49
Penduduk yang Berobat Sendiri		
Laki-Laki + Perempuan	52,60	61,51

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Penduduk Kabupaten Kutai Timur secara umum lebih banyak memilih berobat ke Puskesmas dan praktek dokter/poliklinik. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan berobat ke Puskesmas adalah sebesar 33,20 persen pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (35,00 persen). Fasilitas kesehatan sebagai tempat berobat penduduk selain Puskesmas adalah praktek dokter/poliklinik dan Rumah Sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/poliklinik pada tahun 2020 sebesar 45,91 persen, mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya (38,01 persen).

Tabel 3.3
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020

Fasilitas kesehatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Rumah sakit	34,94	31,48
Praktek Dokter/poliklinik	38,01	45,91
Puskesmas	35,00	33,20
UKBM*	0,00	3,58
Tradisional& lainnya	0,36	0,00

*UKBM terdiri dari poskesdes, posyandu, dan balai pengobatan

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Swasta ataupun Pemerintah, mengalami penurunan dari 34,94 persen pada tahun 2019 menjadi 31,48 persen pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang berobat ke UKBM (poskesdes, posyandu dan balai pengobatan) tahun 2020 adalah sebesar 3,58 persen, di mana pada tahun sebelumnya tidak ada penduduk yang melakukan rawat jalan di UKBM.

Fasilitas kesehatan tradisional merupakan tempat alternatif untuk berobat bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tradisional disini adalah praktik pengobatan tradisional, dukun beranak, dan tempat pengobatan lainnya. Pada tahun 2019 persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan ini sebesar 0,36 persen, sedangkan

Kesehatan

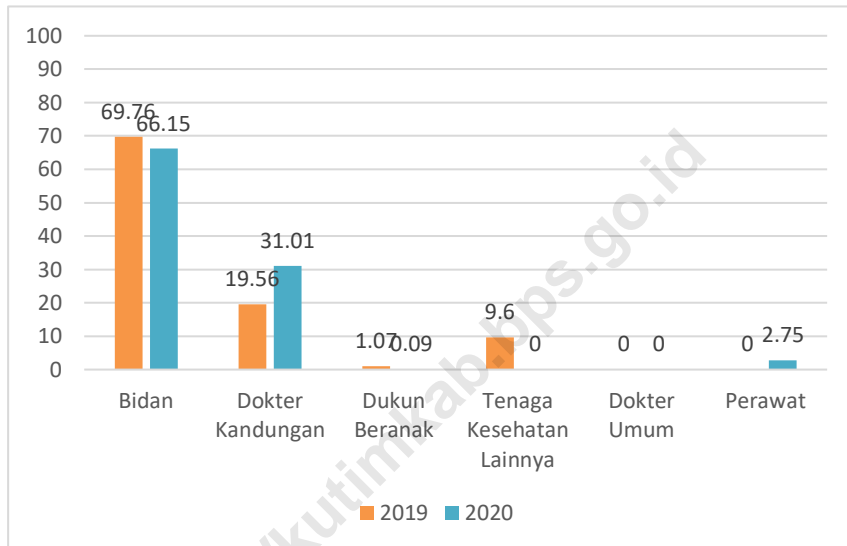
untuk tahun 2020 tidak ada lagi penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan tradisional.

3.3 Tenaga Penolong Persalinan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian, di Kutai Timur masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun maupun tenaga lainnya. Bahkan pada Susenas Maret 2018, di Kutai Timur ditemukan kasus seorang ibu melahirkan sendiri tanpa bantuan. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasanya terdapat di daerah perdesaan. Selain itu, faktor pendidikan dari masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.

Grafik 3.1
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun
menurut Proses Penolong Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur,
Tahun 2019-2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun menurut proses penolong persalinan terakhir di Kabupaten Kutai Timur oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya) pada tahun 2020 sebesar 99,91 persen yang berarti terjadi mayoritas persalinan di Kabupaten Kutai Timur terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Kondisi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga ditandai oleh penurunan proses pertolongan persalinan oleh dukun beranak yang juga mengalami penurunan dari 1,07 persen di tahun 2019 menjadi 0,09 persen di tahun 2020. Dengan demikian dapat dinilai bahwa

Kesehatan

masyarakat sudah lebih *aware* terhadap pertolongan persalinan yang dialaminya, dan lebih memilih untuk pergi ke tenaga kesehatan dibandingkan ke dukun beranak.

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan cukup signifikan pada proses penolong kesehatan terakhir oleh dokter kandungan yang mencapai angka 31,01 persen. Adapun persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh bidan mengalami penurunan, pada tahun 2020 menjadi 66,15 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 69,76 persen. Sedangkan pertolongan persalinan oleh perawat pada tahun 2020 adalah sebesar 2,75 persen.

3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan. Usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan lebih baik jika dilakukan sejak dini. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam upaya tersebut adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bahkan bahan tersebut bernilai gizi tinggi dan serasi untuk kebutuhan bayi seperti laktosa serta bermacam bahan lemak dan protein. Di dalamnya terdapat pula bermacam bahan lain yang sangat dibutuhkan seperti enzim, komponen bioaktif (Roslina Siregar, dkk 1993., Menyusui dan Kesehatan Anak). Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/pencegah penyakit) serta dengan memberikan ASI kepada balita akan memberikan kedekatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak.

Kesadaran ibu untuk memberikan gizi yang baik pada anaknya secara kuantitatif dapat ditunjukkan oleh angka persentase tertinggi untuk masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020, sebanyak 95,57 persen balita berusia kurang dari 2 tahun (baduta) pernah diberi ASI. Sementara untuk lama pemberian ASI, rata-rata lama pemberian ASI pada baduta perempuan adalah 11 bulan, yaitu lebih lama dari rata-rata pemberian ASI pada baduta laki-laki yang hanya 9 bulan.

Tabel 3.4
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Karakteristik	Persentase Baduta Pernah diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	94,01	9,25
Perempuan	97,53	10,68
Kutai Timur	95,57	9,88

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kujimkab.bps.go.id>

BAB 4: PENDIDIKAN

Secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama **12,89** tahun atau setara dengan **Diploma I**

1,15%

penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami **BUTA HURUF**

34,36%

penduduk umur 15 tahun ke atas di Kutai Timur adalah lulusan **SMA dan Sederajat**

*) data tahun 2020





Sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya ketersediaan SDM yang bermoral dan berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah bangsa tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, 20 persen anggaran pendidikan dan bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Pendidikan

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

4.1 Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pendidikan

Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua indikator tersebut merupakan bagian dari perubahan metode baru, yang menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) sebagai pembentuk angka IPM. AMH dinilai sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM karena sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas Pendidikan. Selain itu, nilai AMH di

Indonesia untuk sebagian besar daerah bernilai tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat Pendidikan antardaerah dengan baik. Dengan memasukkan nilai rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, maka dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan menangkap perubahan yang terjadi di dalamnya.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator HLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Tabel 4.1
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Harapan Lama Sekolah	12,48	12,65	12,78	12,89
Rata-rata Lama Sekolah	9,06	9,08	9,18	9,19

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

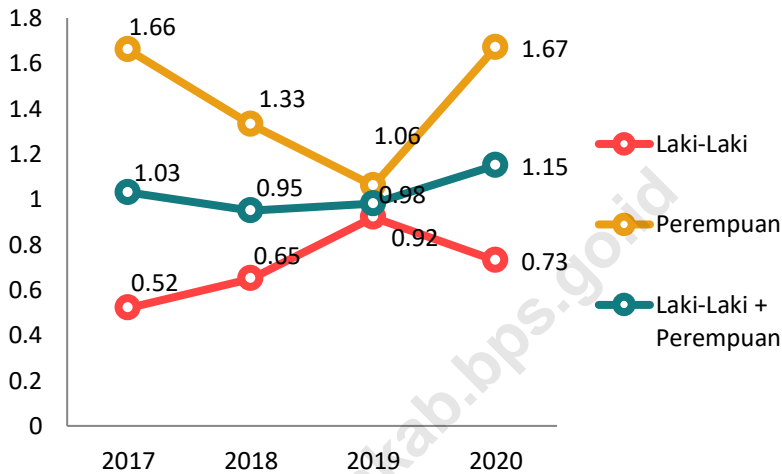
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka HLS di Kabupaten Kutai Timur semakin

Pendidikan

meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2020, angka HLS adalah sebesar 12,89 tahun. yakni sebesar 99,02 persen. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,89 tahun atau setara dengan Diploma I.

Sama halnya dengan HLS, angka RLS di Kabupaten Kutai Timur juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa terdapat angin segar untuk pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. RLS Kutai Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 9,19 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kutai Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,19 tahun atau menamatkan SMP. Hal ini bersesuaian dengan program pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun yang telah digaungkan semenjak beberapa tahun yang lalu. Namun, kondisi ini belum sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun atau sampai sekolah menengah atas. Dengan demikian, sektor pendidikan Kutai Timur masih harus terus dibenahi dan ditingkatkan untuk memberikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas.

Grafik 4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

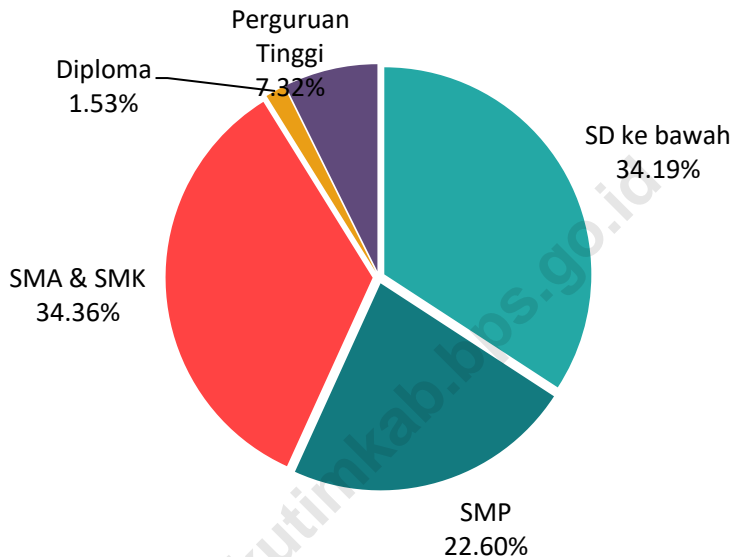
Pada tahun 2020 terdapat 1,15 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kabupaten Kutai Timur. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yakni 0,98 persen. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, penduduk perempuan buta huruf mencapai angka 1,67 persen. Kondisi tersebut dinilai meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang hanya 1,06 persen. Sebaliknya, penduduk laki-laki yang buta huruf pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yaitu, sebesar 0,73 persen pada tahun 2020, di mana pada tahun sebelumnya adalah sebesar 0,92 persen.

Pendidikan

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki. Dengan diketahuinya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020, sebagian besar tamat SMA dan SMK yaitu sebanyak 34,36 persen dan tamat SD ke bawah sebesar 34,19 persen. Secara rinci proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.2
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Pemerintah berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan

Pendidikan

fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah, serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

APS penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun, dan mengalami peningkatan untuk kelompok umur 13-15 tahun. Pada kelompok penduduk usia 7-12 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun dari 99,65 persen pada tahun 2019 menjadi 99,47 persen pada tahun 2020. APS pada kelompok umur 13-15 tahun meningkat dari 98,21 persen pada tahun 2019 menjadi 99,64 persen pada tahun 2020. Sedangkan APS umur 16-18 tahun dari 78,95 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 78,58 persen pada tahun 2020. Penurunan dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk ketiga kelompok umur penduduk ini bisa disebabkan oleh penurunan dan peningkatan APS di kelompok umur lain.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Usia Sekolah	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	99,17	99,66	99,65	99,47
13-15	97,36	98,53	98,21	99,64
16-18	81,77	79,19	78,95	78,58

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, dengan kata lain APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. APM dibagi dalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun yang menjadi sasaran program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). APM di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 untuk jenjang SD adalah 97,75 persen, jenjang SLTP 73,99 persen. Sedangkan APM jenjang SLTA sebesar 70,04 persen.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
APM				
• SD	96,37	96,98	97,41	97,75
• SLTP	78,46	75,01	73,60	73,99
• SLTA	65,68	69,80	70,30	70,04

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kulimkab.bps.go.id>

BAB 5: KETENAGAKERJAAN

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KABUPATEN KUTAI TIMUR ADALAH
SEBESAR

5,45 PERSEN

Sektor lapangan usaha
dominan penduduk Kutai
Timur adalah sektor
PERTANIAN

29,47%
penduduk 15 tahun ke
atas di Kutai Timur,
bekerja di sektor
PERTANIAN

*) data tahun 2020



BAB 5 - KETENAGAKERJAAN -

INKESRA



Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Manusia dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang. Karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor utama apabila dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Perkembangan dari Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 5.1. Dalam publikasi ini PUK dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 15-24, 25-54 dan 55+. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja.

Tabel 5.1
Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24	22,08	24,01	23,72*	23,52
25-54	68,73	64,84	64,61*	62,85
55+	11,64	11,15	11,68*	13,63

Keterangan : *Angka Revisi

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia kerja menurut kelompok umur 15-24 di Kabupaten Kutai Timur pada tahun

2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, di mana penduduk kelompok usia 15-24 tahun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 sebesar 23,52 persen, dan kelompok usia produktif 25-54 tahun sebesar 62,85 persen. Sedangkan untuk usia kurang produktif 55 tahun atau lebih sebesar 13,63 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang cuti, dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur). Dari TPAK, kita dapat melihat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sehingga berpotensi untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 sebesar 68,96 persen. Dapat dilihat pula bahwa TPAK untuk penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dari penduduk perempuan. TPAK laki-laki sebesar 87,16 persen dan TPAK perempuan sebesar 47,12 persen.

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Jenis Kelamin	TPAK			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	86,64	85,31	86,70*	87,16
Perempuan	42,18	49,74	47,71*	47,12
Total	66,75	69,4	69,23	68,96

Keterangan : *Angka Revisi

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (penganggur) terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja akan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti misalnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali

menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Tabel 5.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Jenis Kelamin	TPT			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	4,01	4,70	4,19	5,53
Perempuan	6,11	8,53	8,53	5,27
Total	4,61	5,93	5,53	5,45

Keterangan : *Data tidak tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

TPT pada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 5,45 persen, di mana mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (5,53 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, pada tahun 2020 ini TPT laki-laki lebih tinggi dibanding dengan TPT perempuan. TPT laki-laki tahun 2020 sebesar 5,53 persen dan TPT perempuan sebesar 5,27 persen.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK dapat menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dari besarnya TKK, kita dapat melihat besarnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja merupakan masalah, karena mereka akan menganggur.

Tabel 5.4
Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Jenis Kelamin	TKK			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	95,99	95,3	95,81	94,47
Perempuan	93,89	91,47	91,47	94,73
Total	95,39	94,07	94,47	94,55

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur, jenis kelamin dan perbedaan struktur ekonomi dan migrasi. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja akan selalu berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Jika TPT semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

TKK pada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 94,55 persen, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (94,47 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, pada tahun 2020 ini TKK perempuan lebih tinggi dibanding dengan TKK laki-laki. TKK laki-laki 94,47 persen dan TKK perempuan 94,73 persen.

Lapangan Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja.

Tabel 5.5
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur,
Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	39,56	36,77	31,20	29,47
Pertambangan dan Penggalian	9,42	10,06	10,65	11,02
Industri	2,93	3,41	2,29	2,09
Listrik, Gas dan Air	0,38	0,39	1,13	0,47
Konstruksi	2,52	3,42	6,08	7,59
Perdagangan	18,42	19,70	21,95	22,83
Pengangkutan dan Komunikasi	2,81	3,69	4,71	5,83
Keuangan	3,35	1,61	0,91	1,37
Jasa	20,61	20,95	21,07	19,32
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Ketenagakerjaan

Lapangan usaha dalam hal ini terbagi ke dalam Sembilan sektor, yaitu adalah sektor pertanian, mencakup sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih mencakup pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pengolahan air; sektor konstruksi; sektor perdagangan, mencakup perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pengangkutan dan komunikasi mencakup pengangkutan dan pergudangan serta informasi dan komunikasi; sektor keuangan mencakup aktivitas keuangan dan asuransi; serta sektor jasa mencakup aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, aktivitas jasa lainnya, serta jasa pendidikan.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Hingga tahun 2020, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur. Namun, pada tahun 2020 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2020 sekitar 29,47 persen. Sektor lain yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 11,02 persen di tahun 2020 di mana mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 (10,65

persen). Sektor jasa juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 19,32 pada tahun 2020 di mana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 21,07 persen.

<https://kutimkab.bps.go.id>

<https://kuimkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 6: PENGELUARAN

PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN KABUPATEN KUTAI
TIMUR ADALAH SEBESAR

9,55

Persen



Rata-rata
pengeluaran per
kapita makanan
sebulan untuk
penduduk Kutai
Timur adalah
sebesar

861.406

RUPIAH

Rata-rata
pengeluaran per
kapita untuk
bukan makanan
sebulan untuk
penduduk Kutai
Timur adalah
sebesar

866.245

RUPIAH



*) data tahun 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BAB 6 PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN

INKESRA



Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga.

Pola pengeluaran dapat mencerminkan tingkat kehidupan masyarakat. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara-negara yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Di negara-negara maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga. Semakin besar konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran

untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pengeluaran makanan yang merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat ditunda dan juga sebaliknya untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Tabel 6.1
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut
Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2020

Jenis Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rupiah)
(1)	(2)
Padi-padian	83.922
Umbi-umbian	6.383
Ikan	109.687
Daging	41.838
Telur dan susu	58.250
Sayur-sayuran	71.537
Kacang-kacangan	15.363
Buah-buahan	49.278
Minyak dan kelapa	18.323
Bahan minuman	26.798
Bumbu - bumbu	19.564
Bahan makanan lainnya	18.151
Makanan dan minuman jadi	223.017
Rokok danTembakau	119.293
Total Makanan	861.406

Sumber :BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Konsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, serta aman. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berlaku bijak dalam memilih makanan, tidak semata hanya mempertimbangkan status sosial-ekonomi makanan, namun juga harus seimbang dengan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan dan tumbuh kembang optimal.

Pada Tabel 6.1 dapat dilihat rata-rata konsumsi makanan per kapita sebulan menurut sub kelompoknya di Kutai Timur tahun 2020. Pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebulan sebesar Rp 861.406,00. Di mana, sub kelompok makanan dan minuman jadi memiliki pengeluaran terbesar, yaitu senilai Rp 223.017,00. Sedangkan pengeluaran makanan terkecil adalah sub kelompok umbi-umbian, yakni sebesar Rp 6.383,00

Tabel 6.2
Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut
Jenis Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kutai Timur,
Tahun 2020

Jenis Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rupiah)
(1)	(2)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	474.118
Aneka barang dan jasa	199.505
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	44.089
Barang tahan lama	85.190
Pajak, pungutan, dan asuransi	52.980
Keperluan pesta dan upacara	10.363
Total bukan makanan	866.245

Sumber ; BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan pengalaman, semakin tinggi tingkat pendapatan, proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Pola pengeluaran penduduk sebulan untuk bukan makanan ditampilkan pada Tabel 6.2. Nampak bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran untuk sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga mempunyai porsi terbesar bila dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya. Pengeluaran sub kelompok keperluan pesta dan upacara merupakan pengeluaran dengan porsi paling kecil terlebih pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat membatasi aktivitas berkerumun sehingga pengeluaran untuk sub kelompok ini

menurun. Pada tahun 2020 pengeluaran untuk sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 474.118,00 dan untuk sub kelompok keperluan pesta dan upacara rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 10.363,00

6.2 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang umumnya selalu dihadapi oleh sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan penyakit sosial di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu sehingga dikategorikan miskin. Banyaknya kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi di antaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan sehingga standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

Tabel 6.3
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2016	30.170	9,16
2017	31.950	9,20
2018	33.020	9,22
2019	35.310	9,48
2020	36.980	9,55

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sekitar 36.980 jiwa, terjadi peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya (35.310 jiwa). Secara persentase penduduk miskin naik dari 9,48 persen pada tahun 2019 menjadi 9,55 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.4
Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur,
Tahun 2020

Tahun	Nilai Batas Garis Kemiskinan
	(Rp)
(1)	(2)
2016	470.228
2017	512.345
2018	543.442

Pengeluaran Rumah Tangga & Kemiskinan

2019	569.449
2020	610.858

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2020

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Kutai Timur, garis kemiskinan meningkat dari Rp 569.449,00 pada tahun 2019, menjadi Rp 610.858,00 pada tahun 2020.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kujimkab.bps.go.id>

BAB 7: PERUMAHAN

97,75%

Rumah tangga di Kutai Timur menggunakan penerangan listrik, baik listrik **PLN** maupun **Non PLN**

Rumah tangga di Kutai Timur yang telah mempunyai akses air minum layak adalah sebesar

11,83%

**) data tahun 2020*



BAB 7 - PERUMAHAN -



Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan manusia adalah keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sehat akan melahirkan manusia sehat. Begitu juga orang-orang yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang sehat pula.

Rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan manusia. Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk selain sandang dan pangan. Rumah berfungsi untuk melindungi fisik dari hujan dan panas dan juga sebagai tempat perlindungan dari serbuan binatang buas dan keganasan alam lainnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka fungsi rumah mengalami perkembangan, tidak saja untuk tempat berlindung dari pengaruh kondisi alam, tetapi juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Dilihat dari sudut kejiwaan, rumah merupakan basis terbentuknya kepribadian dan watak manusia. Dalam lingkungan rumah suatu individu mengenal norma-norma tertentu dan adat kebiasaan yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat di sekitarnya. Begitu besar peran dan arti sebuah rumah, membuat

Perumahan dan Lingkungan

semua orang selalu berusaha meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas rumahnya agar dapat mendukung segala aktivitasnya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang terdapat di rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya dapat terlihat dari sumber air minum, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumah tangga.

7.1 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah ketersediaan air bersih, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, dan penerangan listrik.

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di antara

kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum, air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini penggunaan sumber air minum dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan penduduk. Berikut ini ulasan singkat, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, penerangan listrik, dan ketersediaan air bersih

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa rumah tangga yang mempunyai jamban sendiri di Kabupaten Kutai Timur mencapai 88,23 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebanyak 91,57 persen. Fasilitas penting lainnya adalah penerangan. Akses masyarakat terhadap penerangan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, disamping juga disadari adanya hubungan timbal balik di mana tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber energi seperti penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lain. Rumah tangga yang menggunakan

penerangan listrik baik itu listrik PLN maupun listrik non PLN di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 telah mencapai 97,75 persen.

Tabel 7.1
Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2020

Fasilitas Perumahan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jamban Sendiri	91,91	90,14	92,18	88,23
Jamban dengan Tangki Septik	79,71	83,35	87,74	91,57
Penerangan Listrik PLN / non PLN	98,15	99,16	99,68	97,75

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2020 rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan air leding mengalami peningkatan menjadi 3,57 persen dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,72 persen. Kenaikan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan penggunaan air kemasan sebagai sumber air minum sebesar 1,52 persen, yaitu mencapai sebesar 78,63 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 77,11 persen. Penggunaan air melalui sumur bor, air sumur terlindung dan tak terlindung, serta air permukaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (lihat Tabel 7.2). Di mana, persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama adalah sumur bor/pompa mengalami peningkatan dari 0,14 persen menjadi 2,48 persen di tahun 2020. Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama adalah sumur

terlindung/sumur tak terlindung mengalami penurunan dari 7,56 persen menjadi 6,05 persen di tahun sebelumnya. Di samping itu, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari air permukaan, air hujan, dan lainnya. Di mana, persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama adalah air permukaan, air hujan, lainnya mengalami peningkatan secara signifikan dari 2,86 persen menjadi 8,07 persen di tahun 2020. Sumber air minum tak terlindung yang masih dikonsumsi masyarakat hingga saat ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. Namun, kebiasaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk merebus air tersebut sebelum diminum merupakan salah satu upaya guna dapat mencegah masyarakat dari penyakit.

Tabel 7.2
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019-2020

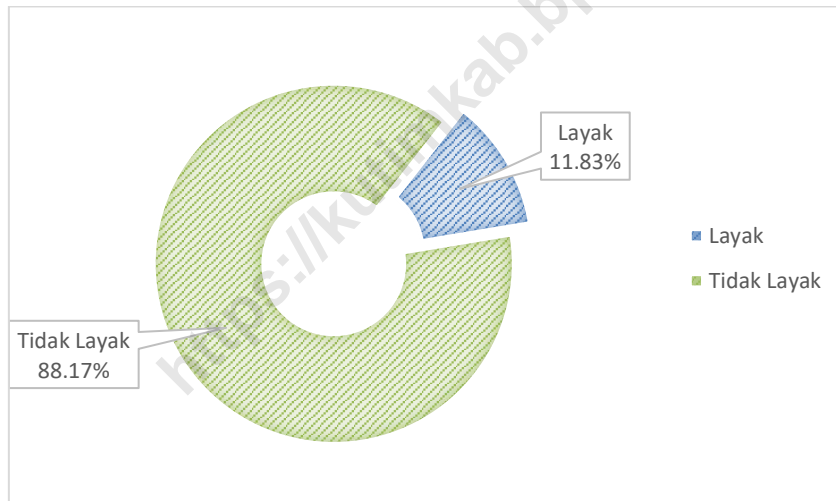
Sumber Air Minum	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Leding	9,72	3,57
Air Kemasan/Air Isi Ulang	77,11	78,63
Sumur Bor/Pompa	0,14	2,48
Sumur Terlindung/Sumur Tak Terlindung	7,56	6,05
Mata Air Terlindung/Mata Air Tak Terlindung	2,61	1,20
Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya	2,86	8,07
Total	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Air minum layak terdiri dari air yang bersumber dari leding meteran, leding eceran, air terlindung (sumur bor/pompa, sumur

terlindung, mata air terlindung) dengan jarak ≥ 10 meter dari tempat penampungan kotoran/limbah dan air hujan, sedangkan air kemasan terdiri dari air kemasan bermerk dan air isi ulang. Sementara itu untuk air minum tidak layak terdiri dari air yang minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air lainnya.

Grafik 7.1
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Akses Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Menurut grafik 7.1, selama tahun 2020 sebanyak 11,83 persen rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan/mempunyai akses air minum layak dan sisanya (88,17 persen) tidak menggunakan/tidak mempunyai akses air minum tidak layak. Apabila disandingkan dengan Tabel 7.2, berdasarkan Tabel 7.2, penggunaan air minum bersih yakni yang salah satunya bersumber

dari air kemasan atau air isi ulang oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur di tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, akses penduduk terhadap sumber air berkualitas dinilai semakin terbuka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut sirusa.bps.go.id, semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah tersebut.

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, maka masalah pembuangan limbah/kotoran meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan limbah rumah tangga merupakan masalah pokok yang harus ditanggulangi sedini mungkin. Karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber dari limbah/kotoran dapat melalui beberapa cara atau jalan antara lain yaitu melalui air, tangan, alat, dan tanah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan limbah/kotoran disertai dengan cepatnya pertambahan jumlah penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit.

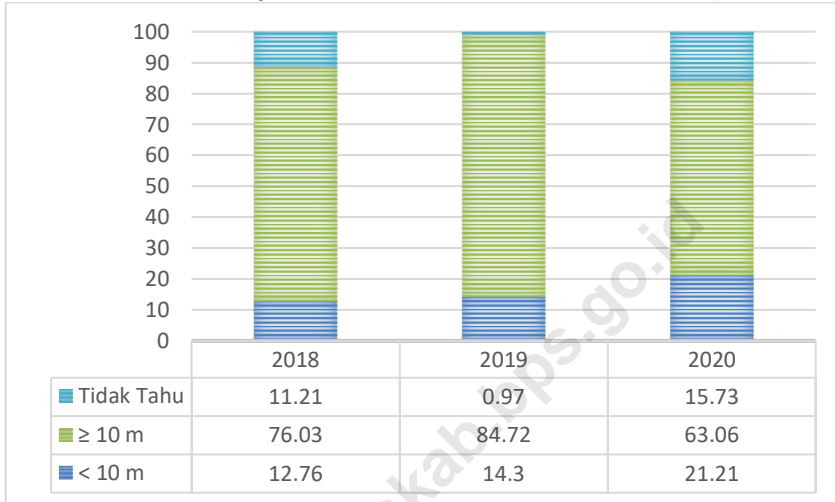
Tempat pembuangan limbah terdekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti tempat pembuangan berupa lubang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia juga tidak terlepas dari aspek

Perumahan dan Lingkungan

kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Jarak sumber air minum, seperti sumur dan mata air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat patut menjadi perhatian. Jarak sumber air minum, terutama yang berasal dari sumur dan mata air, dengan tempat pembuangan limbah terdekat merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan air minum rumah tangga. Semakin pendek jarak tersebut, maka kemungkinan sumber air minum tersebut tercemar zat-zat ataupun unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia semakin besar. Jarak yang aman dan ideal untuk tempat pengambilan air minum ke tempat penampungan kotoran adalah 10 meter lebih. Karena dengan jarak ini rembesan dari air limbah tidak bisa meresap sampai ke sumur atau mata air. Indikator ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat.

Grafik 7.2
Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah
Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2020 (meter)



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan Grafik 7.2 pada tahun 2020, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah lebih dari sama dengan 10 meter yaitu sekitar 63,06 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (84,72 persen). Namun masih terdapat penduduk di Kutai Timur yang menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat (21,21 persen) dan sebanyak 15,73 persen rumah tangga tidak mengetahui jarak antara sumber air minum yang digunakan ke tempat pembuangan limbah terdekat.

7.2 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut mempunyai atap, dinding, dan lantai. Dari ketiga unsur tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan.

Ditinjau dari segi kesehatan, jenis lantai yang digunakan rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat air dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah naik ke lantai. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Lantai tanah dinilai kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit. Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai kayu/papan sebesar 64,30 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,33 persen.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi rumah sehat diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal per orang. Luas lantai tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan

dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangganya. Luas lantai bangunan rumah harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Selain menggambarkan tingkat kesehatan, luas lantai juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m². Pada tahun 2020, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 77,34 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai perorang lebih dari 10 m². Dengan luas lantai terluas merupakan kayu/papan kualitas tinggi sebesar 68,21 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal adalah penggunaan atap dan dinding. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi bangunan cukup kuat. Salah satu ciri konstruksi bangunan yang cukup kuat adalah memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan tidak tiris. Jenis atap terluas yang digunakan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur adalah atap seng.

Tabel 7.3
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan
di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2020

Kualitas Perumahan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Kayu/Papan Kualitas Tinggi	69,33	64,30	68,21
Luas Lantai perkapita > 10 m ²	81,16	80,49	77,34
Atap Seng	86,04	85,67	93,78
Dinding Kayu atau batang kayu	80,38	77,11	82,79

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Di samping itu, jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembab, karena dinding yang lembab menimbulkan resiko terjadinya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lainnya tidak baik untuk kesehatan.

Pada tahun 2020 persentase rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan bahan seng sebagai atap rumahnya adalah sebesar 93,78 persen. Tempat tinggal yang berdinding dengan bahan kayu atau batang kayu 82,79 persen. Indikator jenis atap berupa seng serta dinding berupa kayu atau batang kayu mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019.

Penurunan persentase beberapa indikator kualitas rumah tinggal, seperti lantai kayu/papan kualitas tinggi, atap seng, serta

dinding kayu atau batang kayu di antaranya disebabkan oleh beralihnya preferensi masyarakat untuk meng-*upgrade* material untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Penurunan beberapa komponen tersebut didorong oleh peningkatan beberapa komponen, yakni peningkatan persentase kondisi perumahan rumah tangga dengan lantai terluas adalah keramik, atap yang digunakan adalah genteng, serta dinding yang digunakan adalah tembok.

Sedangkan penurunan indikator luas lantai per kapita mengindikasikan semakin padatnya wilayah permukiman penduduk. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang gerak penduduk.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://kujimkab.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kutimkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

JL.A.W.Syahrani, Bukit Pelangi-Sangatta 75611
Telp. 0549-23223 Faks.0549-24745

Email: bps6404@bps.go.id, Homepage: <http://kutimkab.bps.go.id>

2655-4097



9 770265 540979 >